

**SAUDI VISION 2030 SEBAGAI KATALISATOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS BUTIR KELIMA (KESETARAAN GENDER)
DI ARAB SAUDI TAHUN 2015-2022**

Oleh : Novia Tri Ramadhani

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Saudi Arabia is one of the world's largest oil producers. Revenue from the oil sector contributes up to 80% of state revenue. Income dependence on the oil sector creates an unstable situation in the country's economy so that the government seeks to diversify the economy through Saudi Vision 2030. The government is committed to empowering all Saudi Arabian society to the fullest, including women. Through this policy, the government conducted various policies that eliminated various forms of legal discrimination for women in Saudi Arabia. The empowerment of women contained in the Saudi Vision 2030 is in line with the global goals to be achieved in point five of the Sustainable Development Goals related to achieving gender equality.

To provide more specific accuracy to the results, the author uses the theory of Gender and Development which is the basic reference in seeing the acceleration of women's empowerment and gender equality in Saudi Arabia. The results of the discussion are obtained by analyzing books, journals, news reports, as well as data listed on various related official pages.

The results of the study show that the Saudi Vision 2023 policy plays a role in accelerating gender equality which has a positive impact on the economy and society of Saudi Arabia. This is indicated by the expansion of space for movement and the addition of the work sector for women, followed by a reduction in the female unemployment rate and an increase in economic growth.

Keywords: Saudi Vision 2030, Economic Diversification, Gender Equality, Sustainable Development Goals.

PENDAHULUAN

Arab Saudi terkenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar dunia. Pendapatan sektor minyak ini menyumbang hingga 80% pendapatan negara. Ketergantungan pendapatan terhadap sektor minyak menimbulkan situasi tidak stabil dalam aspek perekonomian Arab Saudi yang merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai dasar konstitusi.

Selain permasalahan ekonomi, Arab Saudi yang menganut hukum syar'i, nilai kepercayaan, norma, dan tradisi juga dihadapkan pada isu kesetaraan gender yang dihasilkan oleh konstruksi sosial masyarakat. Hukum syari'ah berperan penting dalam mempengaruhi keadaan sosial di negara tersebut tidak jarang dinilai mendikte banyak aspek kehidupan masyarakatnya terlebih hak-hak perempuan.¹ Sejatinnya Islam mempunyai konsep kesetaraan gender yang telah diatur dalam Al-Qur'an, namun interpretasi nilai syar'i yang kurang tepat dalam perilaku dan sikap individu tertanam di masyarakat sehingga membentuk konstruksi sosial di masyarakat.²

Konstruksi sosial masyarakat Arab Saudi lebih meninggikan kedudukan laki-laki membentuk sistem patriarki yang erat di masyarakat dengan marjinalisasi peran bahwa laki-laki wajib dilihat sebagai pemimpin

sedangkan perempuan hanya boleh memiliki peran domestik saja, Bahkan dalam dunia Pendidikan di Arab Saudi, program studi laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai konstruksi peran. Berdasarkan *World Report* yang dikeluarkan oleh *Human Right Watch* pada tahun 2014, perempuan di Arab Saudi mengalami banyak bentuk diskriminasi terkait berbagai hak dasarnya yang membutuhkan persetujuan kerabat dekat laki-laki.³

Berbagai pembatasan legal bagi perempuan di Arab Saudi memberikan dampak panjang dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat pengangguran perempuan yang mencapai 20,2% pada 2014. Sebagian besar penganggur adalah perempuan dengan pendidikan S1 dan 42% diantaranya telah berupaya mencari pekerjaan selama lebih dari 10 bulan. Pilihan program studi yang terbatas pada pendidikan dan sastra bagi perempuan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan pada sektor tersebut sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang memberikan *domino effects* bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Tingkat pengangguran yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat sehingga menurunnya permintaan dan produksi barang yang mempersulit terjadinya pengembangan industri sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk tercapai serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi bagi suatu negara.⁴ Disisi lain Arab Saudi harus

¹ Mayer, Ann Elizabeth. 1990. The Shari'ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules? In Nicholas Heer, ed., *Islamic Law and Jurisprudenc*. Seattle: University of Washington Press. Hal. 177-198

² Maslamah, & Muzani, S. 2014. Konsep-Konsep Gender Dalam Pespektif Islam. *SAWWA Jurnal Studi Gender*, Vol. 9 No. 2 Hal. 279-280

³ Human Right Watch. 2014. *World Report 2014 Saudi Arabia*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/saudi-arabia> pada 9 April 2023

⁴ Mahdar, 2015. "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia:

mengambil langkah terutama karena Arab Saudi sadar tidak dapat menggantungkan pendapatannya dari industri minyak mentah saja, terlebih hal ini merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui.

Arab Saudi mulai mengambil langkah *preventive* untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan mengembangkan sektor non-minyak melalui diversifikasi ekonomi yang dikemas dalam kebijakan *Saudi Vision 2030*. Dalam pelaksanaannya Arab Saudi perlu untuk mengembangkan SDM dan menuntaskan permasalahan tingkat pengangguran perempuan yang tinggi. Pembukaan sektor kerja baru untuk perempuan dan promosi kesetaraan kesempatan bekerja bagi laki-laki dan perempuan menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Visi ini sejalan dengan cita-cita global mengenai kesetaraan gender yang tertuang dalam butir kelima SDG's.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh penerapan *Saudi Vision 2030* terhadap perkembangan kesetaraan gender di Arab Saudi pada tahun 2015-2022.

KERANGKA TEORI

Teori *Gender and Development*

Pendekatan *Gender and Development* merupakan pendekatan yang menggaris bawahi upaya pemberdayaan perempuan dan dikenal pada tahun 1980-an dengan mengadopsi pengaruh dari pendekatan *social feminist*.⁵ Pendekatan ini melihat bahwa

Masalah dan Solusi.” Jurnal Al-Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015

⁵ Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan

perempuan bukanlah objek pasif namun *agent of change* yang dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini ingin mengubah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan yang tidak lebih tinggi dibanding laki-laki dan hanya mampu melakukan tugas domestik menjadi sebuah kelompok yang mampu untuk mandiri bahkan berpengaruh pada pembangunan.

Dalam pendekatan ini diperlukan dukungan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan atau bentuk lainnya yang *pro* terhadap perkembangan perempuan. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh kebijakan *Saudi Vision 2030* dapat mendukung kesetaraan gender di Arab Saudi sesuai dengan butir kelima SDG's. Dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang memperluas ruang gerak perempuan menjadi angin segar bagi kesetaraan gender di Arab Saudi dan memberi dampak baik dalam pembangunan ekonomi negara ini.

Dalam hubungan internasional, organisasi internasional menjadi salah satu aktor internasional yang semakin menguat peranannya.⁶ Organisasi internasional menghasilkan rezim yang mengatur hubungan antar negara-negara yang tergabung di dalamnya. Rezim internasional memiliki pengaruh yang kuat untuk dapat memberikan pengaruh dalam perubahan kebijakan atau pola kepentingan suatu negara dalam hubungan internasional.⁷ Fenomena ini menunjukkan SDG's sebagai rezim yang

Sosial. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 No. 1 2015

⁶ Rendi, Syafri, dan Desri. (2015). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis), Journal of Diplomacy and International Studies <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/5182/2511/>

⁷ Ibid

dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mempengaruhi pola kepentingan Arab Saudi hingga mendorong terciptanya perubahan-perubahan kebijakan yang ada di negara tersebut melalui *Saudi Vision 2030*.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menjelaskan variabel penelitian secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan penjelasan dan penggambaran secara sistematis dari fenomena yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*). Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen resmi, artikel, berita, sumber online, dan berbagai penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender Di Arab Saudi Pra *Saudi Vision 2030*

Diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Perempuan telah dilarang mengemudi sejak tahun 1957 sebagai bagian dari penafsiran Islam yang ketat di Arab Saudi. Tidak ada undang-undang formal yang mencantumkan hal ini, namun perempuan yang mengemudi di tempat umum akan dikenakan denda dan dapat ditangkap.⁸ Larangan mengemudi ini menjadi hambatan untuk perempuan Arab Saudi dalam melakukan produktifitasnya. Perempuan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar saat hendak bepergian dengan menyewa taksi ataupun sopir.

⁸ Commins, David 2009. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B.Tauris. hal. 109.

Produktifitas turut terhambat karena perempuan harus menunggu wali atau sopir saat hendak bekerja atau sekolah.⁹

Larangan-larangan yang tertuang dalam kebijakan formal ataupun non-formal yang terjadi di Arab Saudi merupakan bentuk diskriminasi antar gender. Arab Saudi memiliki banyak perbedaan dan batasan berdasarkan gender khususnya perempuan seperti larangan mengemudi, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, larangan masuk stadion, larangan menonton bioskop, bahkan pembatasan akses dalam pendidikan dan pekerjaan.

Arab Saudi memiliki indikasi segregasi gender yang tinggi, bahkan menempati peringkat 5 terbawah tentang kesetaraan gender. Menurut *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2009, Arab Saudi menempati peringkat 130 dari 134 negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab Saudi tidak mendorong perempuan untuk lebih aktif dan bekerja sehingga memunculkan persepsi bahwa perempuan sebaiknya berada di rumah.¹⁰

Gerakan protes terkait larangan ini pun terus dilakukan oleh para aktivis. Gerakan ini semakin kuat pada tahun 2007 ketika sebuah kelompok yang menamakan dirinya Asosiasi Perlindungan dan Pembelaan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi mengajukan

⁹ Saudi Embassy USA. 2022. *The Saudi National Transformation Plan and the Role of Saudi Women*. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=f1B6DwUITnw&list=PLKTKmtEDG1AJYkpcn-5_LAgU8n01j8aJc&index=1&t=860s&pp=gAQBiAQB

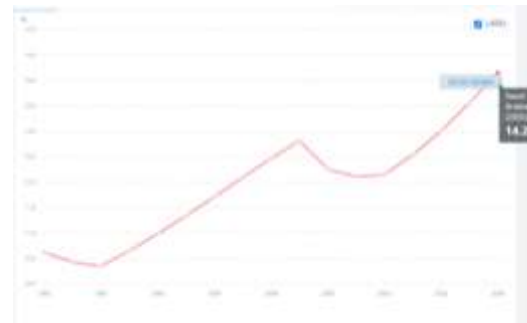
¹⁰ *World Economic Forum*. 2009. *The Global Gender Gap Report*. Diakses melalui https://www3.weforum.org/docs/WEF_Gender_Gap_Report_2009.pdf.

petisi kepada Raja Abdullah untuk mencabut peraturan tersebut. Pada Hari Perempuan Internasional tahun 2008, salah satu pendiri gerakan tersebut, Wajeha Huwaider, memfilmkan dirinya sedang mengemudi dan memposting video tersebut di YouTube, yang mendapat perhatian media internasional. Pada tahun 2011 dibentuklah kampanye *Women2Drive* sebagai bentuk protes terhadap larangan ini dan mendapat perhatian dunia internasional.

Pembatasan hak politik juga dialami oleh perempuan Arab Saudi baik dalam mencalonkan diri, pemilihan ataupun partisipasi politik lainnya. Arab Saudi mengadakan pemilihan pertamanya pada tahun 2005, namun pemerintah tidak memberikan hak bagi perempuan untuk menjadi kandidat bahkan pemilih.¹¹

Tingkat partisipasi kerja perempuan di Arab Saudi sangat rendah, Berdasarkan data dari World Bank yang ditarik dari tahun 1990 hingga 2006, tingkat partisipasi kerja tertinggi hanya berada di angka 21% saja, jika dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata berada di angka lebih dari 50% seperti yang terlihat pada grafik berikut:¹²

**Grafik 1.1 Tingkat Partisipasi
Angka Kerja Wanita Arab Saudi
(Berdasarkan Populasi Umur Diatas
15 Tahun)**



Sumber: World Bank. (2006). *Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate)*.

Sebuah studi menyebutkan bahwa tingkat pengangguran perempuan dalam angkatan kerja Arab Saudi hampir empat kali lipat lebih tinggi dibanding laki-laki pada tahun 2007.¹³ Sektor kerja yang lebih mungkin untuk dilakukan oleh perempuan hanyalah Pendidikan dan administrasi. Faktor lain yang berpengaruh dalam tingkat partisipasi kerja perempuan adalah kurangnya dukungan dari anggota keluarga. Perempuan juga memiliki kekurangan dari segi keterampilan dan pelatihan agar memenuhi syarat untuk memasuki dunia kerja.

Human Development Report 2015 yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan bahwa Arab Saudi memiliki *Gender Development Index* (GDI) dengan nilai 0.901 dengan nilai dari *Human Development Index* (HDI) laki-laki berada di angka 0.846 dan perempuan berada di angka 0.778. Sementara itu *Gender Inequality Index* Arab Saudi menunjukkan nilai sebanyak 0.284 dan berada di peringkat 56 dari

¹¹ HRW. 2011. Saudi Arabia Women to Vote; Join Shura Council. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2011/09/26/saudi-arabia-women-vote-join-shura-council>

¹² World Bank. (2006). Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) - Saudi Arabia. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?end=2006&locations=SA&start=1990> pada 29 Mei 2023

¹³ AlMunajjed, Mona. 2010. "Women's Employment in Saudi Arabia A Major Challenge". Booz & Company diakses melalui https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Womens_Employ

155 negara berdasarkan index tahun 2014. Arab Saudi bahkan tergolong dalam 10 negara dengan tingkat kesetaraan gender terendah di angka 60,3%.¹⁴

Pada tingkat internasional, PBB mendefinisikan diskriminasi gender sebagai Setiap bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, tanpa memandang status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia, hak dan fundamental kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya¹⁵.

Sementara *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), memandang diskriminasi sebagai tindakan yang dapat berasal dari hukum (*de jure*) dan dari praktek (*de facto*). CEDAW mengenali dan mengatasi setiap bentuk diskriminasi yang bersumber hukum, undang-undang, kebijakan, prosedur, dan praktek. Isu kesetaraan gender bagi perempuan Arab Saudi kemudian menjadi perhatian dunia internasional di beberapa dekade terakhir terutama dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's).

SDG's merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai pada tahun 2030.¹⁶

SDG's dirancang untuk mengikuti dan memperluas MDG's, mandat ini tertuang dalam *Conference Outcome Document*, yang diberi judul *The Future We Want*.¹⁷ SDG's kemudian dibentuk oleh Majelis Umum PBB dalam *zero draft* pada Juli 2014 dan disahkan dalam sesi ke-68 *United Nation General Assembly*. SDG's terdiri dari 17 tujuan global yang salah satunya berfokus pada kesetaraan gender yakni pada butir kelima tujuan SDG's.

Butir kelima SDG's berisi upaya untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, tidak hanya Hak Asasi Manusia namun juga demi masa depan yang berkelanjutan, karena pemberdayaan kaum perempuan secara maksimal terbukti dapat membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.¹⁸ Beberapa target yang hendak dicapai dalam butir kelima ini yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
- 2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya.
- 3) Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak,

Goals to Transform Our World diakses melalui <https://www.fao.org/3/CA3121EN/ca312en.pdf>

¹⁷ *ibid*

¹⁸ United Nations Development Programme (UNDP). *The SDGs in Action*. Diakses melalui https://www.undp.org/sustainable-development-goals?gclid=CjwKCAjwhdWkBhBZEiwA1ibLmNb2e9gDBTxaDQ5u0IdvydxkvVYRIFDkBgOPYoGRFCRk3U28SCRnXRoCVmIQAvD_BwE

¹⁴ Gender Equality by Country 2022. 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gender-equality-by-country>

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Food and Agriculture Organization of United Nations. Sustainable Development Goals 17*

- pernikahan dini dan paksa dan mutilasi alat kelamin perempuan.
- 4) Mengakui dan menghargai pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan public, kebijakan infrastruktur, perlindungan sosial, serta mempromosikan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga.
 - 5) Memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.
 - 6) Menjamin akses Universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan *International Conference on Population and Development* dan dokumen tinjauan hasil konferensi *Beijing Platform for Action*.
 - 7) Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap property, layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam sesuai hukum nasional.
 - 8) Meningkatkan penggunaan teknologi terkhusus teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
 - 9) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan undang-undang yang dapat menegakkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di semua tingkatan.

Disisi lain, Arab Saudi mulai membuka aspirasi ekonomi Arab Saudi dan berupaya mengubah kehidupan masyarakat tepatnya oleh Pangeran Muhammad bin Salman pada 25 April 2016 melalui rencana *Saudi Vision 2030*. *Saudi Vision 2030* menjadi sebuah rencana transformasi bersejarah yang dikembangkan oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang diketuai oleh Deputy Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Muhammad bin Salman berambisi untuk mengubah wajah Arab Saudi dari sebuah negara konservatif menjadi moderat dengan pemerintahan terbuka serta menjadi langkah mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak, menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Arab Saudi sebagai salah satu negara yang menandatangani rancangan SDG's turut melakukan langkah-langkah inisiatif melalui *Saudi Vision 2030* guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negaranya.

Penerapan Saudi Vision 2030 Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Berdasarkan Butir Kelima SDG's di Arab Saudi

Melalui *Saudi Vision 2030* perempuan telah menetapkan tujuan komprehensif untuk meningkatkan kontribusi di pasar tenaga kerja, serta mempertahankan hak di sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Arab Saudi merancang kebijakan inisiatif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dikemas dalam *Saudi Vision 2030* sebagai salah satu upaya mewujudkan butir kelima SDG's.

SDG's dan *Saudi Vision 2030* memiliki tujuan yang sama, yakni memaksimalkan potensi SDM yang

dimiliki oleh negara sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan global. Pangeran Muhammad bin Salman yang merupakan Putra Mahkota secara bertahap mempromosikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Arab Saudi tanpa harus dibatasi oleh jenis kelamin dan usia melalui salah satu rancangan yang tertuang dalam *Saudi Vision 2030*. Arab Saudi menyadari bahwa terdapat ketimpangan partisipasi antar gender dalam masyarakatnya dan untuk melakukan diversifikasi ekonomi yang dikemas dalam rancangan *Saudi Vision 2030* perlu adanya kontribusi maksimal dan reformasi dari seluruh sektor.

Visi ini memiliki tiga pilar utama. *Pertama*, Masyarakat Dinamis (*Vibrant Society*), pada poin ini Arab Saudi berfokus pada masyarakatnya yang tetap menganut nilai-nilai islam sebagai identitas. *Kedua*, Pengembangan Ekonomi (*Thriving Economy*), visi ini berfokus pada pengembangan sektor non-minyak dan berusaha memaksimalkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kalangan masyarakat tanpa pemisahan gender maupun usia. *Ketiga*, Bangsa yang Berambisi (*An Ambition Nation*) tentang keinginan pemerintah untuk berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas dalam strategi pemerintahannya.

Melalui *Saudi Vision 2030* terdapat beberapa poin tujuan yang mempromosikan dan memperhatikan pemberdayaan perempuan khususnya melalui pilar *A Thriving Economy*. Hal ini dicantumkan dalam dokumen *Saudi Vision 2030* yang berbunyi:¹⁹

“Saudi women are yet another great asset. With over 50 percent of our university graduates being female, we wil continue to develop their talents, invest in their productive capabilities and enable them to strengthen their future and contribute to the development of our society and economy”.

Sementara itu Badan-badan PBB merencanakan dan bekerja sama sebagai bagian dari sistem pembangunan PBB yang dipimpin oleh *resident coordinator* untuk memastikan penyampaian hasil nyata dalam mendukung *Saudi Vision 2030*, *National Transformation Programme*, dan 17 tujuan SDG’s yang diadopsi pada tahun 2015. PBB bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dan mitra nasional lainnya melalui kerangka kerja strategis dibawah payung *Saudi Vision 2030* untuk mendukung tercapainya SDG’s dan mengatasi tantangan serta peluang pembangunan di Arab Saudi.

Arab Saudi berkomitmen mewujudkan SDG’s melalui berbagai inisiatif dan upaya yang dilakukan. *National Transformation Program* yang diluncurkan Arab Saudi menjadi langkah awal implementasi *Saudi Vision 2030*. Kerajaan Arab Saudi turut menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan butir kelima SDG’s melalui berbagai inisiatif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan dan berkomitmen untuk mengaktifkan peran tersebut di

¹⁹ Kingdom of Saudi Arabia. Vision 2030. Diakses melalui

<https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/>

tingkat local dan internasional.²⁰ Hal ini terlihat dari Inisiatif *Women Empowerment* berbentuk program dan kebijakan yang diterapkan oleh Arab Saudi yaitu:

- 1) Mempromosikan Kesetaraan antar Gender dan Melindungi Hak Pekerja Perempuan. Arab Saudi melakukan reformasi yang didedikasikan untuk mempromosikan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi dengan menetapkan usia yang setara bagi kedua gender, mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam hal upah, pekerjaan bidang kerja, dan jam kerja serta memungkinkan perempuan untuk bergabung dan mempraktikkan bisnis komersial.
- 2) Program Dukungan untuk Pekerja Perempuan diantaranya Qiyadiyah Program (bekal keterampilan), Tamheer Program (bantuan untuk mencari lowongan pekerjaan, memberikan sertifikasi pelatihan), Transportasi Pekerja Perempuan (*Wusool*), *Qurrah* Program (platform layanan pengasuhan untuk pekerja perempuan).²¹
- 3) Memberdayakan Perempuan dalam berbagai Sektor Kerja Salah satu yang ingin dicapai Arab Saudi melalui *Saudi Vision 2030* dan SDG's adalah membuka

sektor kerja baru yang lebih beragam untuk perempuan. Beberapa kementerian telah membuka lowongan pekerjaan bagi perempuan diantaranya Kementerian Kehakiman dan Perdagangan. Selain itu perempuan telah dapat mendaftarkan bisnis sendiri, mengajukan merek dagang, melakukan *freelance*, mendaftarkan agen bisnis, dan melakukan aktivitas kewirausahaan lain yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Partisipasi perempuan dalam politik pun semakin dipromosikan dengan kuota sebanyak 20% atau 30 anggota perempuan dari 150 anggota Dewan Syura.

Hasil Penerapan *Saudi Vision 2030* Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Berdasarkan Butir Kelima SDG's di Arab Saudi

Arab Saudi dinilai berhasil mereformasi sistem sosial dengan memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di negaranya melalui *Saudi Vision 2030* yang didasarkan pada:

1. Perluasan Ruang Gerak Perempuan. *Saudi Vision 2030* yang diinisiasi oleh Pangeran Mohammed bin Salman menjadi awal dari kemunculan program dan kebijakan pro kesetaraan gender. Setelah 30 tahun larangan diterapkan, pada 26 September 2017 Kerajaan Arab Saudi menerbitkan *Royal Decree M/85* mengenai ketentuan berkendara. Kerajaan memutuskan untuk mencabut larangan mengemudi dan memberi hak mengajukan surat izin mengemudi bagi

²⁰ GOV.SA Unified National Platform. 2023. *Women Empowerment* Diakses melalui <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempowering>

²¹ Cortes, Patricia, dkk. 2018. *If Women Receive More Childcare Support, Will They Work?.* Policy Insight: Harvard Kennedy School. Diakses melalui <https://epod.cid.harvard.edu/sites/default/files/2019-07/Cortes%20-%20Childcare%20as%20Potential%20Barrier%20to%20Employment.pdf>

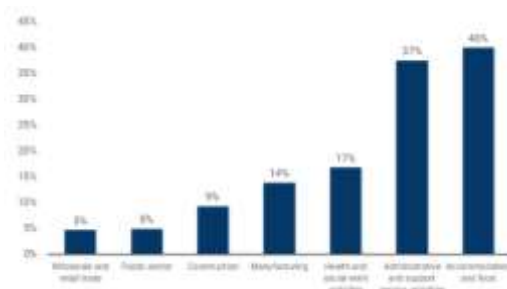
perempuan.²² Melalui langkah ini, Arab Saudi membebaskan perempuan dari banyak kendala seperti menyewa pengemudi pria untuk perjalanan jarak pendek. Lebih lanjut, kebijakan ini memungkinkan semakin banyak perempuan yang bergabung dalam Angkatan kerja bahkan mengembangkan bisnis sendiri. Pembaharuan kebijakan ini memperluas gerak perempuan Arab Saudi. Menurut laporan *King Faisal Center for Research (KFCRIS)*, Arab Saudi telah melonggarkan kebijakan memungkinkan perempuan untuk bepergian keluar negeri sendiri, mengajukan paspor, mendaftarkan kelahiran, memutuskan pernikahan dan perceraian, serta mendapat perawatan medis tanpa harus mengantongi izin dari keluarga laki-laki sebagai syarat. Perempuan Arab Saudi saat ini telah dapat membuka bisnis sendiri, menyaksikan pertandingan olahraga, konser, serta acara hiburan lainnya. Kebebasan sosial ini sebelumnya tidak dapat dirasakan sebelum adanya *Saudi Vision 2030*.

2. Penambahan Sektor Kerja Bagi Perempuan. Sesuai dengan komitmen yang dinyatakan dalam *Saudi Vision 2030*, Arab Saudi melihat perempuan sebagai aset yang berharga layaknya laki laki dan akan terus mengembangkan potensi yang dimiliki serta berinvestasi pada produktivitas

²² Dewi, Nevy & Fikri, Azza & Febriani, Afifah. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *JURNAL SOSIAL POLITIK*. 6 (30) 10.22219/sospol.v6i1.11208.

perempuan untuk berkontribusi dalam memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi. Penambahan sektor kerja bagi perempuan menjadi capaian yang berdampak signifikan. Reformasi ini setidaknya telah menguntungkan 6 juta perempuan Arab Saudi yang berusia di atas 21 tahun dan akan terus berdampak pada generasi selanjutnya. Terdapat peningkatan lapangan kerja bagi perempuan yang pada awalnya hanya diisi oleh laki-laki seperti bidang konstruksi, manufaktur, akomodasi, dan makanan sebanyak 40% pada 2020. Arab Saudi berhasil menciptakan 909.000 lapangan kerja baru yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan per tahun 2022 yang sebelumnya hanya menargetkan sebanyak 617.000 lapangan kerja seperti yang terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1.2 Peningkatan angka pekerja perempuan sudi secara substansial di seluruh sektor



Sumber: World Bank. 2022. Saudi Women Taking on New Jobs.

3. Berkurangnya Tingkat Pengangguran Perempuan. Pemerintah membenahi beberapa sistem seperti memberi insentif untuk melindungi perempuan bekerja, melindungi hak

persamaan hak antar gender dalam pekerjaan, mempermudah akses kredit, menyetarakan hak gaji serta dana pensiun untuk laki-laki dan perempuan, mengatur masa cuti hamil dan melahirkan dengan lebih baik, bahkan mempersiapkan program transportasi khusus pekerja wanita dan penitipan anak bagi ibu bekerja. Hal ini menunjukkan hasil, dalam dua tahun terjadi peningkatan tajam jumlah perempuan dalam Angkatan kerja. Per tahun 2020 sebanyak 33% perempuan Angkatan kerja telah dan sedang aktif mencari kerja. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya berada pada angka 20%.²³ Dalam rentang tahun yang sama, tingkat pengangguran perempuan pun mengalami penurunan dari 32% menjadi 24%. Pada tahun 2021 tingkat partisipasi kerja perempuan mencapai 35,6%, Arab Saudi berhasil mencapai bahkan melampaui target *Saudi Vision 2030* yakni 30% partisipasi kerja perempuan. Pada kuartal pertama tahun 2022, tingkat partisipasi kerja perempuan Arab Saudi sempat mengalami penurunan di angka 33,6% namun kembali bangkit di angka 35,6% pada kuartal kedua. Tingkat pengangguran perempuan juga berhasil diturunkan meski masih jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021

pengangguran perempuan mencapai angka 22,2%, terus mengalami penurunan pada 2022 mencapai angka 19,3 %.²⁴

Melalui *Saudi Vision 2030*, Arab Saudi berhasil memberdayakan perempuan di negaranya yang berdampak pada kesetaraan gender sesuai dengan cita-cita global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* butir kelima. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan Arab Saudi guna memaksimalkan perekonomian negara turut memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan hak-hak perempuan yang hendak dicapai dalam SDG's butir kelima yakni penghapusan diskriminasi, hak dalam pernikahan, memberikan sarana dan prasarana yang mendukung pemberdayaan perempuan, partisipasi ekonomi dan politik, dan berbagai reformasi hak perempuan lainnya.

Walaupun dinilai berhasil mereformasi sistem sosial dengan memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di negaranya melalui *Saudi Vision 2030*, pemerintah Arab Saudi juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penerapan *Saudi Vision 2030*. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Arab Saudi dan umat muslim. Penolakan justru berasal dari aspek internal Kerajaan Arab Saudi karena perubahan-perubahan yang dibentuk dapat mengancam norma, nilai, dan budaya yang dimiliki Arab Saudi. Para ulama Wahhabiyah yang mendirikan Dinasti As-Saud menjadi

²³ Tamayo, Sofia Gomez. Koettl, Johannes. Rivera, Nayib. 2021. The Spectacular Surge of the Saudi Female Labor Force. Diakses melalui <https://www.brookings.edu/articles/the-spectacular-surge-of-the-saudi-female-labor-force/>

²⁴ Saikali, Susan. 2022. Saudi Women in the Workforce. Diakses melalui The Arab Gulf State Institute in Washington <https://agsiw.org/saudi-women-in-the-workforce/>

pihak yang menentang hal ini karena mencederai nilai ajaran Islam.

Selain itu, tantangan eksternal turut menjadi hambatan dalam mewujudkan *Saudi Vision 2030*. Citra dan reputasi Pangeran Mohammed bin Salman menjadi perbincangan yang masih dipertanyakan di dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh adanya publikasi dari *Central Intelligence Agency* (CIA) yang mengatakan bahwa ia terlibat dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi yakni jurnalis yang kerap mengkritik kepemimpinan dan pangeran dan keadaan Arab Saudi.²⁵ Berita ini pun dikutuk sebagai pelanggaran terhadap hak manusia dan memiliki kontradiksi dengan visi pembangunan global yang hendak dicapai. Hal ini dapat mempengaruhi proses transformasi identitas yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi mengembangkan program-program *Saudi Vision 2030* seperti VRP dan Giga proyek lainnya.

KESIMPULAN

Arab Saudi berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan mengembangkan sektor non-minyak melalui diversifikasi ekonomi yang dikemas dalam kebijakan *Saudi Vision 2030*. Arab Saudi membutuhkan kontribusi maksimal dari seluruh masyarakat termasuk kaum

perempuan. Sistem sosial yang mengekang, diikuti pembatasan dan diskriminasi legal bagi perempuan di negara ini berdampak pada ketimpangan gender. Melalui *Saudi Vision 2030* Arab Saudi memberdayakan dan mengaktifkan peran perempuan. Komitmen ini sejalan dengan tujuan global dalam *Sustainable Development Goals* butir kelima mengenai kesetaraan gender. Arab Saudi juga menjadikan *Saudi Vision 2030* sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Arab Saudi mulai membenahi sistem yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan dengan memperluas gerak perempuan. Pencabutan larangan mengemudi serta menempatkan perempuan dalam kepemimpinan menjadi langkah awal pemberdayaan ini. Arab Saudi juga membuka lebih banyak sektor kerja tanpa ada pembatasan gender. Disamping itu pemerintah juga mendukung perempuan untuk mendapat pendidikan yang setara dengan laki-laki, memberikan pelatihan, mempersiapkan transportasi khusus perempuan, tempat penitipan anak untuk memudahkan ibu bekerja, dan program-program pemberdayaan perempuan lainnya. Tujuan Arab Saudi untuk melakukan diversifikasi ekonomi negaranya turut mempromosikan dan mempercepat terjadinya penyetaraan gender di negara ini, sesuai dengan cita-cita kesetaraan gender yang hendak dicapai dalam *SDG's* butir kelima.

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2022 Arab Saudi berhasil mencapai banyak target yang ditetapkan dalam *Saudi Vision 2030*. Arab Saudi berhasil membuka ratusan ribu sektor kerja baru untuk laki-laki dan perempuan. Peningkatan partisipasi kerja

²⁵ Harris, S., Miller, G., & Dawsey, J. (2018). CIA concludes Saudi crown prince ordered Jamal Khashoggi's assassination - The Washington Post. *Washingtonpost.Com*, 2. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-concludessaudi-crown-prince-ordered-jamalkhashoggisassassination/2018/11/16/98c89fe6-e9b2-11e8-a939-9469f1166f9d_story.html?utm_term=.b5574d0ac86e

perempuan berhasil dicapai bahkan melebihi target, dan tingkat pengangguran perempuan turut mengalami penurunan. Upaya Arab Saudi untuk memberdayakan dan memberi kesempatan yang sama bagi masyarakatnya memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Maka capaian terkait gender dalam rancangan *Saudi Vision 2030* turut menjadi perkembangan bagi perwujudan tujuan kelima SDG's di Arab Saudi.

REFERENSI

Buku

- Commins, David 2009. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B.Tauris.
- Mayer, Ann Elizabeth. 1990. *The Shari'ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?* In Nicholas Heer, ed., *Islamic Law and Jurisprudenc*. Seattle: University of Washington Press.

Jurnal

- Dewi, Nevy & Fikri, Azza & Febriani, Afifah. (2020). *Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman*. JURNAL SOSIAL POLITIK. 6 (30) 10.22219/sospol.v6i1.11208.
- Mahdar, 2015. "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi." *Jurnal Al-Buhuts* Volume 11 Nomor 1 Juni 2015
- Maslamah, & Muzani, S. 2014. *Konsep-Konsep Gender Dalam Pespektif Islam*. SAWWA Jurnal Studi Gender, Vol. 9 No. 2.

Probosiwi, R. (2015). *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1 2015

Rendi, Syafrri, dan Desri. (2015). *Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)*, *Journal of Diplomacy and International Studies*
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/5182/2511/>

Website/Berita

- AlMunajjed, Mona. 2010. "Women's Employment in Saudi Arabia A Major Challenge ". Booz & Company diakses melalui https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Womens_Employment
- Cortes, Patricia, dkk. 2018. *If Women Receive More Childcare Support, Will They Work? Policy Insight*: Harvard Kennedy School. Diakses melalui <https://epod.cid.harvard.edu/sites/default/files/2019-07/Cortes%20-%20Childcare%20as%20Potential%20Barrier%20to%20Employment.pdf>
- Food and Agriculture Organization of United Nations. Sustainable Development Goals 17 Goals to Transform Our World* diakses melalui <https://www.fao.org/3/CA3121EN/ca3121en.pdf>
- Gender Equality by Country 2022. 2022. <https://worldpopulationreview.com>

- com/country-rankings/gender-equality-by-country
- GOV.SA Unified National Platform. 2023. *Women Empowerment* Diakses melalui <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womene empowering>
- Harris, S., Miller, G., & Dawsey, J. (2018). CIA concludes Saudi crown prince ordered Jamal Khashoggi's assassination - The Washington Post. *Washingtonpost.Com*, 2. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-concludessaudi-crown-prince-ordered-jamalkhashoggisassassination/2018/11/16/98c89fe6-e9b2-11e8-a939-9469f1166f9d_story.html?utm_term=.b5574d0ac86e.
- HRW. 2011. Saudi Arabia Women to Vote; Join Shura Council. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2011/09/26/saudi-arabia-women-vote-join-shura-council>
- Human Right Watch. 2014. World Report 2014 Saudi Arabia. Diakses melalui <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/saudi-arabia> pada 9 April 2023
- Kingdom of Saudi Arabia. Vision 2030. Diakses melalui <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/>
- Saikali, Susan. 2022. Saudi Women in the Workforce. Diakses melalui The Arab Gulf State Institute in Washington <https://agsiw.org/saudi-women-in-the-workforce/>
- Saudi Embassy USA. 2022. The Saudi National Transformation Plan and the Role of Saudi Women. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=f1B6DwUITnw&list=PLKTkmtEDG1AJYkpcn-5_LAgU8n01j8aJc&index=1&t=860s&pp=gAQBiAQB
- Tamayo, Sofia Gomez. Koettl, Johannes. Rivera, Nayib. 2021. The Spectacular Surge of the Saudi Female Labor Force. Diakses melalui <https://www.brookings.edu/articles/the-spectacular-surge-of-the-saudi-female-labor-force/>
- United Nations Development Programme (UNDP). The SDGs in Action. Diakses melalui https://www.undp.org/sustainable-development-goals?gclid=CjwKCAjwhdWkBhBZEiwA1ibLmNb2e9gDBTxaDQ5u0IdvydxkvVYRIFDkBgqOPYoGRFCRk3U28SCRnXR0cVmIQAvD_BwE
- World Bank. (2006). Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) - Saudi Arabia. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?end=2006&locations=SA&start=1990> pada 29 Mei 2023
- World Economic Forum*. 2009. *The Global Gender Gap Report*. Diakses melalui https://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2009.pdf.